

BAB I

^PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia diharuskan menyusun perencanaan keuangan, pelaksanaan kegiatan, dan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya guna mewujudkan pelayanan publik yang baik. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi kunci disahkan dan diundangkannya APBD melalui Peraturan Daerah.

Sejak tahun 2007 sampai tahun 2011, terdapat persentase peningkatan pendapatan daerah rata-rata sebesar 11,4% dengan persentase peningkatan tertinggi di tahun 2011 sebesar 18%, dimana pada tahun 2011 pendapatan daerah terhitung sebesar Rp 459,856 triliun sedangkan di tahun 2010 pendapatan daerah terhitung hanya sebesar Rp386,338 triliun.

Kebijakan otonomi daerah menjadikan pemerintah pusat sebagai sumber dana bantuan yang diandalkan oleh pemerintah daerah, dimana dana bantuan tersebut berupa dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum (DAU) diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah (PAD)nya. Penggunaan dana alokasi umum (DAU) diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Meskipun pemerintah daerah telah memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan namun hal tersebut belum dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, ini membuktikan bahwa masih rendahnya kemandirian pemerintah daerah di Indonesia.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim dan Kusufi, 2012). Padahal dari hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Dwijayanti dan Ruserlistyanti, 2013). Walaupun demikian, untuk mengelola keuangan daerah tingkat kejujuran, transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan sikap yang demokratis, maka pengamatan rasio-rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selayaknya dapat dilakukan walaupun pedoman akuntansi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim dan Kusufi, 2012).

Informasi yang memiliki tingkat akurasi dan kompetensi yang tinggi dari laporan memang sangat diinginkan oleh setiap orang pada masa sekarang ini. Manajemen dari suatu perusahaan cenderung akan meminta seseorang untuk mengaudit laporan yang ada agar dapat diketahui bahwa laporan tersebut mempunyai nilai kebenaran dalam penyajiannya. Laporan keuangan dari suatu perusahaan menjadi laporan yang paling sering diaudit. Laporan keuangan dari suatu perusahaan merupakan suatu bentuk dokumentasi keuangan perusahaan yang disajikan kepada masyarakat untuk periode keuangan yang telah berakhir. Tetapi, orang-orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut tidak benar-benar memahami laporan keuangan itu. Maka, diperlukan para ahli yang mampu menerjemahkan laporan keuangan dan memberikan opini yaitu seorang auditor atau akuntan publik.

Opini audit adalah laporan hasil dari pemeriksaan telah dilakukan oleh auditor terdaftar dimana laporan yang telah dibuat itu harus sesuai dengan aturan atau norma audit dengan pendapat kewajaran dari proses audit laporan keuangan yang dilakukan. Ada beberapa tahap audit yang harus dilewati oleh auditor untuk mendapatkan opini audit atas laporan keuangan yang telah diaudit.

Tugas dari auditor yaitu melakukan pemeriksaan sesuai atau tidaknya laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan dengan menggunakan standar akuntansi dan format yang berlaku. Pada tahap akhir, auditor akan memberikan opini audit atas laporan keuangan yang diperiksanya. Opini audit merupakan

bentuk pernyataan kewajaran laporan keuangan perusahaan oleh auditor. Kewajaran yang dimaksud meliputi posisi keuangan, arus kas dan materialitas. Terjemahan laporan keuangan ini merupakan opini audit yang digunakan oleh para *stakeholder* untuk pengambilan keputusan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan (*going concern*).

Opini audit diberikan oleh auditor dengan melalui beberapa tahap audit sehingga auditor tersebut bisa memberikan kesimpulan dari opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya tersebut.

Menurut Zulaikha (2006) bahwa *judgment* sering diperlukan ketika memberikan opini atas kewajaran setelah melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. *Judgment* merupakan perilaku pemilihan keputusan yang berasal dari proses kognitif (Hogarth, 1992). Untuk menentukan *judgment*, berbagai bukti konkrit dan relevan untuk periode yang berbeda akan dikumpulkan oleh auditor dan bukti-bukti tersebut menjadi bahan untuk mengintegrasikan informasi yang ada. Kejadian yang telah berlalu, kejadian sekarang, dan kejadian yang akan terjadi menjadi dasar pemberian *judgment* (Jamilah, dkk 2007). Menurut Jamilah, dkk (2007) bahwa *Judgment* adalah proses tanpa henti untuk mendapatkan informasi (baik berupa *feedback* dari tindakan sebelumnya), diterimanya informasi lebih lanjut oleh auditor, dan pilihan (bertindak atau tidak).

Geiger *et al* (1996) memaparkan bahwa banyaknya bukti yang menunjukkan pada saat auditor menerbitkan opini *going concern* perusahaan cenderung akan melakukan penggantian auditor. Perusahaan sehat akan melakukan penggantian auditor lebih sedikit daripada perusahaan yang bermasalah (Schwartz dan Menon,

1985). Hal tersebut dapat dikarenakan tidakpuasnya pihak manajemen perusahaan atas opini yang diberikan oleh auditor ataupun karena kebijakan perusahaan.

Kandungan informasi yang diberikan dalam opini audit harus dapat merefleksikan kondisi yang sebenarnya perusahaan. Kualitas auditor akan mempengaruhi kualitas informasi yang diberikan. Auditor berskala kecil mempunyai kemampuan yang lebih kecil dalam menghindari kritik yang merusak reputasi dibandingkan auditor berskala besar (DeAngelo, 1981). Hal ini bertentangan dengan Margareta dan Fanny (2000), Barnes dan Huan (1993), Sidhu dan Sharma (2001) menyatakan bahwa besar kecilnya KAP tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit perusahaan.

Decta Pitron Lugastoro (2013) meneliti variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasilnya mempunyai pengaruh positif, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Decta Pitron Lugastoro (2013) pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil berpengaruh positif. Akan tetapi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif. Selanjutnya Budi Santosa (2013) meneliti variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasilnya negatif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Budi Santosa Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada jumlah sampel yang digunakan dan periode waktu sebelumnya. Pada penelitian Budi Santosa periode yang digunakan adalah dari tahun 2013, sedangkan pada penelitian ini menggunakan

periode yang terbaru 2014. Guna memperluas penelitian, sehingga dapat didapat hasil akhir penelitian yang berbeda.

Mengacu pada berbagai ulasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang rasio keuangan pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap opini audit. Maka peneliti tertarik untuk memilih judul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap opini audit pemerintah daerah di Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap opini audit pemerintah daerah di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap opini audit pemerintah daerah di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap opini audit pemerintah daerah di Jawa Tengah
2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap opini audit pemerintah daerah di Jawa Tengah

3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap opini audit pemerintah daerah di Jawa Tengah
4. Menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap opini audit pemerintah daerah di Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai pengaruh rasio keuangan daerah terhadap opini audit pemerintah daerah di Jawa Tengah.

1.4.2 Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan laju pembangunan daerah, peningkatan kemajuan sumber daya manusia dan opini audit di Indonesia.

1. Bagi Perusahaan, pemerintah dan perusahaan dapat meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dengan memingkatkan keterampilan kerja
2. Bagi Investor, agar investor dapat mengetahui gambaran umum pemerintah indonesia mengenai opini audit dan kewajiban apa saja yang telah dijalankan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi di pemerintahan yang akan dituju

3. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah seluruh provinsi di Indonesia dalam penyusunan kebijakan daerah agar dapat menambah potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan opini audit
4. Bagi Karyawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan motivasi bagi karyawan untuk selalu meningkatkan kemampuan kerja dan prestasi kerja guna meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upah yang diterima
5. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menambah pengetahuan, dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai opini audit